

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Gampong Tanjung Punti Kecamatan Tanah Jambo Aye Permasalahan dalam penelitian ini yaitu implementasi dana gampong Tanjung Punti masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya yaitu besarnya dana yang diperuntukkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat, namun menurut pengakuan masyarakat Tanjung Punti, mereka belum merasakan manfaat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi dan hambatan dalam alokasi dana gampong di Tanjung Punti. Penelitian ini difokuskan pada komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi serta hambatannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi alokasi dana gampong. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa komunikasi berupa sosialisasi implementasi kebijakan ADG kurang dilaksanakan, Sumber daya antara lain sumber daya yang berkaitan dengan SDM pelaksana belum memadai, baik jumlah maupun kompetensi. Sikap yang ditunjukkan oleh aparat pelaksana kebijakan pengelolaan keuangan gampong belum cukup positif dan responsive. Struktur birokrasi dalam alokasi dana gampong terdiri dari Tim 1 yang mengelola alokasi dana gampong di Tanjung Punti yang membiayai bidang pemerintahan dan Tim 2 mengelola kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat. Hambatan internal implementasi kebijakan alokasi dana gampong karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hambatan eksternal yaitu masih terbatasnya partisipasi dan keterlibatan warga. Untuk itu, sebagai saran masyarakat harus ikut serta dalam setiap pelaksanaan program yang ada dan peningkatan kemampuan administratif ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan teknis. Berkaitan dengan pelaksanaan implementasi alokasi dana gampong maka hendaknya sosialisasi terhadap kebijakan ADG diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan ADG, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi.

Kata Kunci : implementasi kebijakan alokasi dana gampong, kesejahteraan masyarakat

ABSTRACT

This study examines the Implementation of the Village Fund Allocation Policy in Improving Community Welfare in Tanjung Punti Village) ". The problem in this study is the implementation of village funds in Tanjung Punti, there are still a number of problems including the amount of funds allocated to the community empowerment sector, but according to Tanjung Punti community, they have not felt the benefits. The formulation of the problem in this study is how the implementation and obstacles in the allocation of village funds in Tanjung Punti. This research focuses on communication, resources, the disposition and structure of the bureaucracy and the obstacles. The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of village fund allocation. This study uses a qualitative approach. The results of the study explain that communication in the form of socialization of the implementation of ADG policy is not implemented enough. Resources include resources related to implementing human resources that are not sufficient, both in number and competence. The attitude shown by the apparatus implementing the village financial management policy has not been positive and responsive. The bureaucratic structure in the gampong fund allocation consists of Team 1 which manages the allocation of gampong funds in Tanjung Punti which finances government fields and Team 2 manages activities in the field of community empowerment. Internal barriers to the implementation of village fund allocation policies due to the low quality of human resources. External obstacles are the limited participation and involvement of citizens. For this reason, as a suggestion, the community must participate in any existing program implementation and this administrative capacity improvement can be done by providing technical training. In connection with the implementation of the village fund allocation, the socialization of the ADG policy should be given to the general public so that after understanding the ADG policy, the community will also be easier to participate in.

Keywords: implementation of village budget allocation policy, community welfare